

# Sekolah Demokrasi untuk Memperkuat Fondasi Demokrasi Indonesia bersama Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta

**Ahmad Sahide<sup>1</sup>, Ahdiana Yuni Lestari<sup>2</sup>, Rezki Satris<sup>3</sup>**

1.2. Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

2. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

3. Program Studi S1-Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta, Jl. Ring Road Utara, Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

ahmadsahide@umy.ac.id

DOI: 10.18196/ppm.41.842

## Abstrak

Indonesia sudah menerapkan sistem demokrasi selama kurang lebih dua dekade lamanya sejak berakhirnya rezim Orde Baru Soeharto pada 1998. Sejak saat itu, pemilihan umum (pemilu) telah menjadi satu-satunya cara dalam proses pergantian kepemimpinan nasional dan lokal di Indonesia. Indonesia pun sudah sukses menyelenggarakan pemilihan umum selama lima kali, yaitu pada 1999, 2004, 2019, 2014, dan 2019. Inilah bukti keberhasilan Indonesia dalam mengkonsolidasikan demokrasinya. Namun demikian, yang menjadi sorotan dari proses berdemokrasi di Indonesia adalah rendahnya kualitas demokrasi kita. Hal ini terlihat dari banyaknya pemimpin yang terpilih secara demokratis, terutama kepala daerah, yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk terus memperkuat iklim berdemokrasi Indonesia dan salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menyelenggarakan Sekolah Demokrasi. Pengabdian ini dengan mengambil mitra Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta dilakukan untuk membangun hal tersebut. Metode yang kami lakukan adalah FGD, ceramah, dan kemudian menyebarkan kuesioner kepada peserta untuk melacak pemahaman peserta terkait dengan demokrasi. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan adanya kemajuan pemahaman peserta terkait dengan demokrasi.

*Kata Kunci:* Indonesia, sekolah demokrasi, kualitas rendah.

## Pendahuluan

Indonesia sudah dikenal dunia sebagai salah satu negara mayoritas muslim yang berhasil mengkonsolidasikan demokrasinya. Indonesia telah menjawab keraguan beberapa ilmuwan politik dunia yang berpandangan bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa berjalan beriringan. Hal itu disebabkan dalam teologi Islam terdapat defisit demokrasi. Namun demikian, keberhasilan Indonesia dalam mengkonsolidasikan demokrasinya dalam dua dekade terakhir telah membantahkan pandangan pesimis tersebut.

Keberhasilan Indonesia dalam membangun iklim yang demokratis ini diakui dunia. Hillary Rodham Clinton, sewaktu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada periode pertama kepemimpinan Barack Obama, mengatakan bahwa jika Anda ingin melihat Islam, demokrasi, dan modernitas berjalan beriringan, datanglah ke Indonesia, “*If you want to know whether Islam, democracy, modernity, and women’s rights can coexist, go to Indonesia*” (Hoesterey, 2013: 56). Oleh karena itu, perjalanan demokrasi Indonesia dalam dua dekade terakhir bukan hanya sebatas klaim sebagaimana banyak pemimpin di dunia yang mengklaim pemerintahannya demokratis, tetapi unsur-unsur negara yang demokratis tidak terdapat di dalamnya. Indonesia tidaklah demikian. Unsur-unsur negara yang demokratis dapat kita uji di dalamnya.

Robert E. Dahl, salah satu ilmuwan top di dunia, memberikan delapan unsur-unsur negara yang demokratis. Kedelapan unsur tersebut antara lain adanya kebebasan membentuk dan

bergabung dalam organisasi, adanya kebebasan berekspresi, adanya hak dipilih dan memilih, terbukanya ruang yang relatif sama untuk menduduki jabatan-jabatan publik, diberi ruang bagi pemimpin politik untuk berkompetisi dalam mendapatkan dukungan atau dengan memberi dukungan, tersedianya alternatif sumber-sumber informasi, terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil, pelebagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara dan cara-cara lain yang sejenis (Dahl, 1971: 7).

Jika kita membaca dinamika berdemokrasi Indonesia pascalengsernya Soeharto (1998) dengan teori Dahl di atas, nampaknya Indonesia sudah memenuhi kedelapan unsur tersebut meskipun akhir-akhir ini ada wacana yang dilemparkan ke publik bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran. Namun demikian, menurut pandangan kami, wacana tersebut perlu dipertanyakan sebab rakyat kita tidak dibatasi ruangnya untuk berekspresi dan tidak ada larangan dalam berkumpul atau bergabung dalam organisasi (Hizbut Tahrir Indonesia tentu dengan pengecualian) juga siapa pun boleh mencalonkan diri untuk menduduki jabatan-jabatan publik, bahkan orang tidak paham politik sekalipun.

Rakyat juga masih kaya dengan alternatif sumber-sumber informasi, misalnya media cetak ada *Kompas*, *Republika*, *Suara Merdeka*, *Seputar Indonesia*, *Jawa Pos*, dan lain sebagainya. Media elektronik ada Metro tv, TvOne, MNCTV, Kompas tv, Net tv, Trans tv, Trans7, dan sebagainya. Semua menyuguhkan berita yang beragam dan dengan *framing* berbeda kepada seluruh rakyat Indonesia. Unsur-unsur yang lainnya juga masih terpenuhi dalam iklim berdemokrasi kita jika ditilik satu per satu. Maka dari itu, wacana yang berkembang akhir-akhir ini bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran patut dipertanyakan dan sepertinya kurang mendasar (Sahide, 2020: 22).

Jika kita membaca demokrasi Indonesia dengan menggunakan teori dari Jack Snyder, demokrasi Indonesia sudah masuk dalam kategori demokrasi yang matang. Snyder membedakan demokratisasi menjadi dua macam, yakni negara-negara yang demokrasiya matang (*mature democracies*/MD) dan negara yang sedang menuju demokrasi (*democratizing states*/DS). Menurut Snyder, salah satu syarat suatu negara untuk dikategorikan *mature democracy* adalah ketika pemilihan umum menjadi satu-satunya cara dalam proses pergantian kepemimpinan kemudian negara tersebut setidaknya sudah dua kali menyelenggarakan pemilihan umum untuk proses pergantian kepemimpinan.

Sementara negara yang sedang menuju demokrasi (*democratizing states*/DS) didefinisikan Snyder sebagai negara yang baru saja memenuhi satu atau lebih prasyarat yang telah disebutkan sebelumnya sekalipun negara itu masih mempertahankan ciri-ciri penting yang tidak demokratis (Snyder, 2003: 16-17). Demokrasi Indonesia, jika membacanya dari teori Snyder, sudah memasuki fase untuk bisa disebut demokrasi matang. Hal itu disebabkan setelah rezim Orde Baru lengser pemilihan menjadi satu-satunya cara dalam proses pergantian kepemimpinan. Di samping itu, daur ulang kepemimpinan melalui pemilihan umum sudah berlangsung selama lima kali (1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019). Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang telah memasuki tahap *mature democracies* tidak terbantahkan lagi.

Pencapaian demokrasi Indonesia tersebut bukan tanpa catatan. Salah satu catatannya adalah perjalanan demokrasi kita mengalami stagnasi (Olle Tornquist) atau melambat (Edward Aspinall), dan yang paling penting untuk dicatat adalah kualitas berdemokrasi kita sangat rendah. Hal itu dapat kita lihat dari banyaknya kepala daerah yang dipilih secara demokratis (gubernur,

bupati, wali kota) yang terjerat kasus korupsi dan tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercatat, pada tahun 2016 misalnya, sedikitnya 32 persen politikus parpol hasil dari pemilu-pemilu dan pilkada yang demokratis ditangkap KPK (Haris, 2019). Belum lagi upaya tersistematis dari para anggota dewan yang dipilih oleh rakyat untuk membunuh KPK secara perlahan.

Artinya, bahwa proses berdemokrasi kita yang sudah matang tersebut belum menjadi cara melahirkan orang-orang terbaik untuk menjadi pemimpin di republik ini. Padahal, sejatinya idealitas demokrasi menurut Dahl adalah untuk memilih orang-orang terbaik sebagai pemimpin. Perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru belum mengantarkan kita pada level demokrasi semacam ini. Demokrasi kita belum berhasil menghadirkan “nabi- nabi sosial” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi kita lebih banyak menghadirkan “perampok-perampok sosial dan berjamaah”.

Dalam upaya membenahi kualitas demokrasi Indonesia inilah, kami menyelenggarakan kegiatan Sekolah Demokrasi untuk generasi muda Indonesia. Dari merekalah, kami berharap bahwa perlahan-lahan demokrasi Indonesia bisa meningkat kualitasnya. Dalam kegiatan pengabdian ini, kami memilih Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta sebagai mitra kami. Sejak berdirinya, KBM telah berhasil menghimpun banyak mahasiswa dan anak-anak muda yang punya ketertarikan dalam dunia literasi yang datang dari berbagai latar belakang kampus, daerah, agama, suku dan lain-lain (Sahide dkk, 2017). Oleh karena itu, komunitas ini menjadi salah satu komunitas yang tepat untuk menjadimitra kami dalam kegiatan Sekolah Demokrasi ini.

### **Metode Pelaksanaan**

Demokrasi telah menjadi bagian dari sistem politik Indonesia selama kurang lebih dua dekade lamanya. Namun demikian, sistem politik ini belum berhasil menjawab dengan maksimal persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Bahkan, banyak yang berpandangan bahwa demokrasi, terutama demokrasi liberal yang bercorak Barat, menjadi bagian dari persoalan itu.

Hal itu disebabkan demokrasi Indonesia semakin hari semakin mahal harganya. Oleh karena itu, figur-figur yang muncul ke publik sebagai calon pemimpin adalah figur-figur yang mempunyai modal yang cukup besar yang tidak diiringi dengan konsep dan gagasan yang besar. Tidak heran jika praktek berdemokrasi kita banyak melahirkan orang-orang yang tidak mempunyai konsep dan gagasan sebagai pemimpin. Yudi Latif pernah mengatakan bahwa Indonesia dipimpin dengan gagasan serampangan, dengan cara bermain-main, dan dengan moral yang rapuh. Inilah dampak dari demokrasi dengankualitas rendah.

Oleh karena itu, dari situasi yang kita hadapi saat ini sudah seharusnya peran-peran masyarakat, terutama komunitas-komunitas di masyarakat, ikut andil dalam menciptakan iklimberdemokrasi yang lebih baik. Komunitas Belajar Menulis (KBM) sebagai mitra yang telah kami pilih diharapkan mampu menjawab tantangan zaman terutama persoalan-persoalan dalam berdemokrasi di Indonesia.

Untuk membangun kesadaran kebangsaan dan pemahaman demokrasi bagi generasi muda dan mahasiswa, dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Focused Group Discussion* (FGD) mengenai mengai problem demokrasi,
- b. Ceramah tentang konsep *civil society*,
- c. Ceramah yang memberikan motivasi kepada peserta dalam membangun gagasan-gagasan

kebangsaan,

d. Diskusi tentang pemahaman berita-berita *hoaks* yang dapat merusak kualitas demokrasi,

e. Evaluasi program akan dilakukan melalui dua termin besar, yakni dengan

a. Metode *Pre-Test*, di mana peserta mitra diminta mengisi kuesioner sebelum memasuki materi awal dilakukan

b. Metode *Post-Test*, di mana peserta mitra diminta mengisi kuesioner setelah mengikuti semua materi kegiatan pengabdian.

## Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dari program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan topik Sekolah Demokrasi Untuk Memperkuat Fondasi Demokrasi Indonesia Bersama Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2021 di Warkop Bejo. Kegiatan pengabdian ini dihadiri sebanyak dua puluh orang dari gabungan KBM dan Himpunan Mahasiswa Islam dengan tiga orang narasumber/penceramah yang hadir, yaitu Dr. Ahmad Sahide, S.IP., M.A., Ahdiana Yuni Lestari, S.H.,M.H., dan Rezki Satris, S.IP., M.A. juga dibantu oleh dua orang moderator, yaitu Misran (mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) UMY dan Muhammad Aditya (Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).



Gambar 1. Peserta pendidikan demokrasi KBM  
Sumber: dokumentasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian

Adapun materi dari kegiatan ini adalah membangun demokrasi tanpa politik uang serta memberikan pengetahuan tentang arti *civil society*. Selain itu, mereka juga dibekali pengetahuan tentang mengantisipasi hadirnya berita *hoaks* dalam ruang demokrasi yang sering disalahartikan. Dalam hal ini, demokrasi yang mengusung unsur kebebasan sering dianggap bebas dalam segala hal. Kegiatan ini menjadi pengetahuan baru mengingat materi-materi yang diberikan belum pernah mereka dapatkan secara spesifik di bangku kuliah. Kegiatan ini tentu sangat bermanfaat dan menjadi bekal pengetahuan ke depannya.



Gambar 2. Penyerahan sertifikat peserta pendidikan demokrasi  
Sumber: dokumentasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian

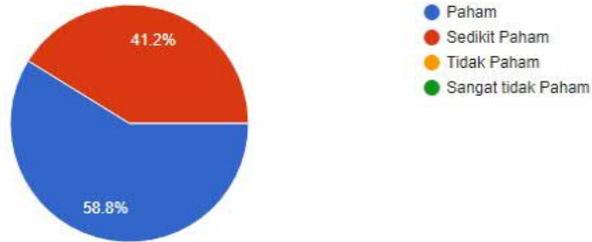
Dari hasil evaluasi melalui kuesioner yang diedarkan baik sebelum maupun sesudah pengabdian, kami melihat bahwa kegiatan ini memberikan nilai manfaat yang besar dalam mendorong generasi muda untuk memahami lebih jauh tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi dan mendorong generasi muda untuk bisa mengawal demokrasi di segala bidang. Hal ini juga dapat kita lihat dari hasil survei yang dilakukan terhadap tujuh belas responden melalui kuesioner yang diedarkan sebelum pengabdian dengan pertanyaan inti, yaitu 1. Pemahaman konsep Demokrasi, 2. Kebebasan berpendapat dan berserikat menjadi bagian dari demokrasi dengan indikator hadirnya kebebasan pers dan media 3. Pengetahuan tentang aturan perundang-undangan tentang berita *hoaks*, dan terakhir, solusi yang tepat dalam menangkal berita *hoaks*. Dari keempat pertanyaan inti ini, dapat kita lihat hasil survei sebelum kegiatan pengabdian dilakukan.

Hasil kuesioner sebelum dilakukan pendidikan demokrasi



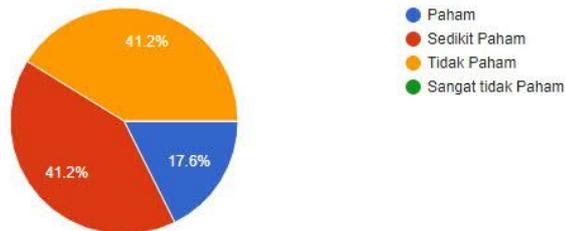
3. Apakah anda memahami bahwa kebebasan pers dan media menjadi bagian dari demokrasi?

17 responses



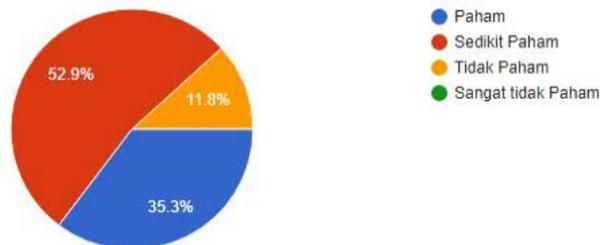
12. Apakah anda paham tentang aturan dan undang-undang bagi pembuat berita hoaks?

17 responses



13. Apakah anda memahami solusi yang tepat untuk menangkal berita hoaks?

17 responses



Dari hasil survei ini, diketahui bahwa tingkat pemahaman mitra pengabdian sebelum kegiatan dilakukan terkait dengan pertanyaan konsep demokrasi menunjukkan 58,8% responden menjawab sedikit paham, sementara 41,2% responden menjawab paham. Dalam konteks kebebasan pers sebagai bagian dari indikator demokrasi, diketahui 41,2% responden memberikan jawaban sedikit paham dan 58,8% menjawab paham. Selain itu, dalam hal pemahaman tentang aturan hukum dan undang-undang tentang berita *hoaks*, diketahui 17,6% responden menjawab paham, 41,2% responden menjawab tidak paham. Hal ini berimbang dengan jawaban dari

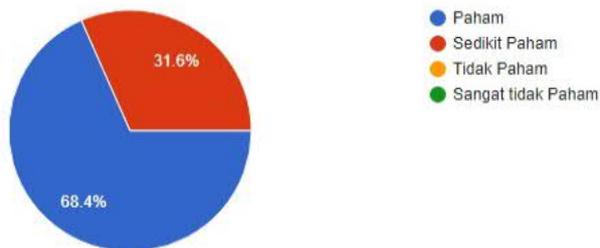
responden yang menjawab sedikit paham. Sementara dalam hal pemahaman tentang solusi yang tepat dalam menangkal berita *hoaks* di media, diketahui 52,9% responden menjawab sedikit paham, 11,8% responden menjawab tidak paham, dan terakhir 36,3 % responden menjawab paham.

Untuk melihat perkembangan atau tingkat kemajuan pemahaman mahasiswa terkait dengan konsep demokrasi tersebut setelah pengabdian, kita bisa melihat hasil survei yang dilakukan setelah pengabdian dilaksanakan.

Hasil kuesioner setelah peserta mengikuti pendidikan demokrasi

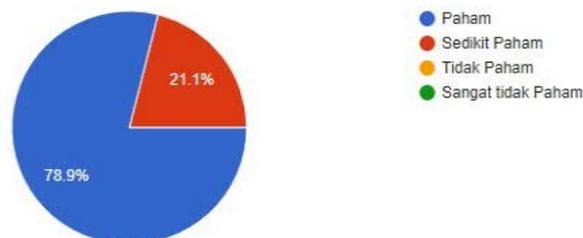
1. Apakah anda paham tentang konsep demokrasi?

19 responses



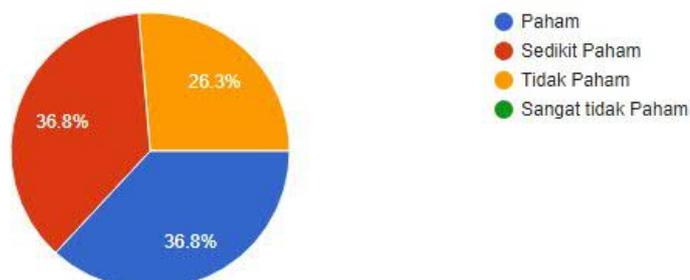
3. Apakah anda memahami bahwa kebebasan pers dan media menjadi bagian dari demokrasi?

19 responses



12. Apakah anda paham tentang aturan dan undang-undang bagi pembuat berita hoaks?

19 responses



13. Apakah anda memahami solusi yang tepat untuk menangkal berita hoaks?

19 responses



Dari hasil *Post-Test* yang dilakukan setelah kegiatan pengabdian di atas, dapat kita lihat hasilnya bahwa tingkat pemahaman tentang konsep demokrasi naik 27,2% dari sebelumnya. Sementara, pemahaman kebebasan pers adalah bagian dari demokrasi tingkat pemahaman mereka 58,8% persen naik menjadi 78,9%. Dalam hal pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dari berita *hoaks*, naik dari 17,6% menjadi 36,8%, dan yang terakhir terkait solusi dalam mengatasi berita *hoaks* juga mengalami kenaikan sebesar 22,6 %. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang seperti ini dapat dilihat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh mitra. Tidak heran jika para peserta pengabdian menginginkan hal yang serupa dilakukan di masa-masa yang akan datang sebagai bagian dari transformasi ilmu dengan penanaman demokrasi.

## Simpulan

Pengabdian kepada masyarakat memiliki tema Sekolah Demokrasi untuk Memperkuat Fondasi Demokrasi Indonesia Bersama Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta. Konsep sekolah demokrasi sebagai bagian dari pembelajaran politik masyarakat dalam membentuk kesadaran berdemokrasi penting untuk terus dilakukan sebagai bagian dari partisipasi kita menjadi masyarakat kampus dalam mendorong generasi muda meningkatkan semangat nilai-nilai kebhinekaan ataupun kebangsaan yang mulai tergerus oleh zaman. Oleh karena itu, pengabdian ini menjadi salah satu yang diharapkan oleh mahasiswa demi meningkatkan pemahaman nilai-nilai demokrasi yang benar di masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner yang kami sebar ke para peserta menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait dengan demokrasi di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Dahl, Robert A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Heaven, Con: YaleUniversity Press.
- Haris, Syamsuddin (ed). 2019. *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Hoesterey, James B. 2013. *Is Indonesia a Model for the Arab Spring? Islam, Democracy, andDiplomacy*. Review of Middle East Studies, 47(1), 56-62.
- Sahide, Ahmad, dkk. (2017). *KBM dan Insomnia Kota Budaya*. Yogyakarta: The PhinisiPress.

- Sahide, Ahmad. 2020. *Demokrasi dan Mahkota Politik*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Snyder, Jack. 2003. *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah*. Terj. Martin Aleidadan Parakitri T. Simbolon. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.